



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
NOMOR: 84.1/I/2018
TENTANG
PERATURAN TATA TERTIB MAHASISWA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA



REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

- Memperhatikan :
1. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta nomor 076/I/2005 tentang Peraturan Tata Tertib Mahasiswa tanggal 16 Agustus 2005;
 2. Keputusan Rapat Pimpinan Universitas dengan Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Surakarta tanggal 8 Desember 2013;
 3. Hasil Rapat Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dengan Tim Disiplin Mahasiswa dan seluruh Staf Kemahasiswaan pada tanggal 4 Januari 2018;
 4. Surat Permohonan Wakil Rektor III Nomor: 236/A.1-I/MAWA/VII/2018 Tanggal 7 Juli 2018 Perihal Permohonan SK Rektor Tentang Peraturan Tata Tertib Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka mengembangkan aktivitas dan membentuk mahasiswa intelektual yang berkualitas dan berkepribadian Islami, perlu diciptakan suasana kampus yang kondusif, bernuansa akademik dan Islam;
 2. Bahwa dalam rangka menanamkan kedisiplinan dan kejujuran menuju Universitas Muhammadiyah Surakarta yang berkualitas, diperlukan rumusan peraturan tata tertib mahasiswa;
 3. Bahwa SK Rektor Nomor 045/I/2010 Tentang Peraturan Tata Tertib Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta yang selama ini berlaku dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi saat ini, sehingga perlu untuk melakukan perubahan;
 4. Bahwa untuk itu perlu diterbitkan Keputusan Rektor.

- Mengingat : 1. Undang – Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No.02/PED/I.0/B/2012 Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
3. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No.178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012 Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
4. Statuta Universitas Muhammadiyah Surakarta;
5. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta No. 047/VIII/2005 Tentang Penetapan Peraturan-Peraturan di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Surakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengesahkan Peraturan Tata Tertib Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta;
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- Ketiga : Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal 2 Agustus 2018 M
20 Dzulqo'dah 1439 H



Rektor,

Dr. H. Sofyan Anif, M.Si.
NIDN: 0625066301

v/Tembusan :

1. Yth. Ketua BPH;
2. Yth. Wakil Rektor;
3. Yth. Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana;
4. Yth. Ketua Lembaga/Ka. Biro/Ka. Unit;
5. Yth. Ormawa dan UKM di lingkungan UMS;
6. Arsip.

**PERATURAN TATA TERTIB MAHASISWA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Muhammadiyah Surakarta, selanjutnya disebut UMS adalah Perguruan Tinggi Islami yang mengemban amanah menyelenggarakan pendidikan untuk membentuk manusia yang berakhlak mulia dan berjiwa amar ma'ruf nahi munkar.
2. Tata tertib adalah seperangkat peraturan yang mengatur kedudukan, hak, kewajiban, dan aktivitas mahasiswa.
3. Disiplin adalah segala bentuk sikap dan perilaku mahasiswa yang mematuhi ketentuan – ketentuan yang berlaku
4. Aktivitas adalah segala kegiatan mahasiswa yang bersifat akademik dan non akademik.
5. Mahasiswa adalah seluruh peserta didik yang terdaftar di Biro Administrasi Akademik.
6. Tersangka adalah mahasiswa yang diketahui, dilaporkan dan/atau diadukan oleh dan/ atau kepada Ketua Program Studi (Jurusan), Pimpinan Fakultas, Pimpinan Universitas, atau Tim Disiplin Mahasiswa karena diduga telah melakukan pelanggaran tata tertib ini atau peraturan lain yang berlaku di UMS.
7. Terperiksa adalah mahasiswa yang diperiksa dan/atau diklarifikasi oleh Tim Disiplin Mahasiswa atas laporan dan/atau aduan.
8. Kampus adalah fasilitas lembaga pendidikan dengan segenap lingkungan fisik dan non fisik.
9. Organisasi kemahasiswaan adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa kearah perluasan wawasan untuk dapat meningkatkan penalaran, minat, bakat dan kesejahteraan mahasiswa
10. Sanksi adalah hukuman akademik dan/atau administratif yang dijatuhkan kepada mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan atas pelanggaran ketentuan dalam surat keputusan ini.
11. Pelanggaran adalah segala bentuk perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dalam surat keputusan ini.
12. Larangan adalah segala perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh mahasiswa
13. Tim Khusus adalah dosen dan tenaga kependidikan yang diangkat oleh Rektor / Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dengan tugas khusus untuk mengendalikan keamanan dan ketertiban kampus.
14. Tim Pencari Fakta (TPF) adalah dosen yang diangkat oleh Rektor / Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dengan tugas untuk mencari fakta yang bisa dijadikan bukti dalam membuat rekomendasi.
15. Kejahatan adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa baik sendiri maupun bersama yang ditentukan dalam Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP) maupun peraturan lain yang berlaku di Indonesia.
16. Keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah putusan pengadilan yang dijatuhkan oleh hakim yang sudah tidak mempunyai upaya hukum lagi.
17. Tim Disiplin Mahasiswa terdiri dari Tim Disiplin Mahasiswa tingkat Fakultas dan Tim Disiplin Mahasiswa tingkat Universitas.

18. Tim Disiplin Mahasiswa Universitas adalah dosen yang ditetapkan oleh Rektor dengan Surat Keputusan Rektor yang bertugas untuk menerima, memeriksa, dan membuktikan dugaan pelanggaran dan/atau kejahatan yang dilakukan mahasiswa, serta merekomendasikan sanksi kepada Pejabat yang berwenang.
19. Tim Disiplin Mahasiswa tingkat Fakultas adalah dosen yang ditetapkan oleh Dekan dengan Surat Keputusan Rektor bertugas untuk menerima, memeriksa, dan membuktikan dugaan pelanggaran dan/atau kejahatan yang dilakukan
20. mahasiswa sesuai dengan kewenangannya, serta merekomendasikan sanksi kepada Pejabat yang berwenang.
21. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah Rektor, Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan tingkat universitas dan Dekan untuk tingkat fakultas.

BAB II ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Pasal 2

- (1) Untuk meningkatkan penalaran, minat, bakat dan kesejahteraan mahasiswa perlu dibentuk organisasi kemahasiswaan;
- (2) Organisasi Kemahasiswaan diselenggarakan oleh mahasiswa berdasarkan Keputusan Pimpinan Universitas dan / atau Fakultas.
- (3) Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Muhammadiyah terdiri dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau IMM, Organisasi perwakilan mahasiswa disebut Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) dan organisasi pelaksana yaitu Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dibawah koordinasi Pimpinan Universitas dan/atau Fakultas.
- (4) Kegiatan keilmuan, penalaran, minat, bakat, dan kesejahteraan mahasiswa tingkat universitas secara khusus dilaksanakan oleh Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).
- (5) Kegiatan mahasiswa tingkat fakultas ditekankan pada pengembangan keilmuan dan penalaran.
- (6) Kegiatan mahasiswa tingkat jurusan /program studi dilaksanakan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan/ Program Studi (HMP) dikhususkan pada pengembangan profesi keilmuan dibawah koordinasi dan pembinaan Pimpinan Fakultas dan Ketua Program Studi / Jurusan.
- (7) Organisasi mahasiswa tingkat universitas bertanggungjawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Organisasi kemahasiswaan tingkat fakultas bertanggungjawab kepada Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.
- (8) Kegiatan organisasi kemahasiswaan tingkat universitas atau tingkat fakultas/program studi tidak boleh bertentangan dengan syari'at, peraturan perundang – undangan, peraturan persyarikatan, peraturan Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan kode etik mahasiswa.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA

Pasal 3

Mahasiswa memiliki hak sebagai berikut :

1. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Memperoleh pembelajaran, pengajaran, bimbingan, informasi ilmiah, dan layanan sebaik – baiknya untuk kemajuan studinya;
3. Mengembangkan penalaran dan keilmuan, minat dan bakat sesuai dengan kemampuannya;
4. Memanfaatkan fasilitas yang dimiliki UMS sesuai ketentuan yang berlaku;
5. Mengikuti kegiatan ekstra kurikuler sesuai ketentuan yang berlaku;
6. Pindah ke perguruan tinggi lain, atau ke jurusan (program studi) lain di UMS;
7. Mengajukan selang studi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

8. Memperoleh santunan kesehatan/kecelakaan dan kematian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
9. Memperoleh beasiswa baik dari universitas, pemerintah, maupun lembaga lainnya secara kompetitif;
10. Melaksanakan aktivitas didalam kampus antara pukul 06.00 s.d. pukul 22.00 WIB.

Pasal 4

Mahasiswa memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Melakukan registrasi dan herregistrasi pada tiap awal semester dan tahun ajaran sebagaimana ketentuan UMS;
2. Melakukan konsultasi kepada pembimbing akademik;
3. Mengisi Formulir Al Islam dan Kemuhammadiyaahan secara online
4. Mengikuti kegiatan Proses Belajar Mengajar (PBM);
5. Menyusun tugas akhir dan/ atau karya ilmiah sesuai ketentuan yang berlaku;
6. Ikut memelihara sarana dan prasarana di lingkungan kampus;
7. Menjaga wibawa dan nama baik almamater;
8. Menjaga dan mengembangkan nilai – nilai kebudayaan nasional;
9. Menjunjung tinggi dan melaksanakan syari'at Islam.

BAB IV SANKSI

Pasal 5

- (1) Mahasiswa dan Organisasi kemahasiswaan yang terbukti melanggar syari'at, peraturan tata tertib ini dan peraturan lain yang berlaku di UMS dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
- (2) Jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 1. Diberhentikan sebagai mahasiswa;
 2. Skorsing atau diberhentikan sementara sebagai mahasiswa paling lama 4 (**empat semester**) selama – lamanya empat (4) semester;
 3. Mengganti kerugian baik dalam bentuk barang atau uang dalam jumlah tertentu;
 4. Dibatalkan nilai mata kuliah tertentu;
 5. Tidak lulus atau dibatalkan mengikuti mata kuliah tertentu;
 6. Tidak dapat diusulkan sebagai calon mahasiswa berprestasi dan/atau penerima beasiswa tertentu;
 7. Dikenai larangan mengikuti kuliah dan/atau ujian mata kuliah tertentu;
 8. Diberi peringatan tertulis;
 9. Diberi peringatan lisan.
 10. Pembinaan Akhlaq
- (3) Jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada organisasi kemahasiswaan sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) pasal ini adalah:
 1. Skorsing atau diberhentikan kegiatan organisasi mahasiswa;
 2. Tidak diberikannya anggaran kegiatan kepada organisasi mahasiswa
 3. Pemotongan dana / anggaran ORMAWA /UKM sebanyak – banyak 75%
- (4) Nomor urut sanksi sebagaimana ayat (2) dan ayat 3 menunjukkan tingkat kualitas (bobot) sanksi berat ke ringan.
- (5) Jenis sanksi sebagaimana ayat (2) angka 1 pasal ini hanya dapat dijatuhkan oleh Rektor

Pasal 6

Penjatuhan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 5 dapat dilakukan secara alternative dan/atau kumulatif.

Pasal 7

Penjatuhan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (2) angka 10 dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Lembaga Pengembangan Pondok Al Islam dan Kemuhammadiyah (LPPIK)

Pasal 8

Pengulangan pelanggaran akan dikenakan sanksi setingkat lebih berat .

BAB V LARANGAN

Pasal 8

(1) Mahasiswa dilarang

1. Mengambil barang milik UMS atau lembaga kemahasiswaan secara tidak sah;
2. Memaksa dengan ancaman atau kekerasan baik langsung atau tidak langsung untuk mengganggu atau menggagalkan:
 - a. Aktivitas civitas akademika dan tamu di wilayah UMS;
 - b. Penggunaan fasilitas yang dikelola oleh UMS;
 - c. Jalan masuk atau jalan keluar wilayah yang dikelola oleh UMS.
3. Memaksa atau meneror pejabat, dosen, karyawan, atau sesama mahasiswa baik secara langsung maupun tidak langsung untuk tujuan tertentu.
4. Menghasut atau membantu orang lain untuk ikut dalam suatu kegiatan yang mengganggu atau merusak fungsi tugas UMS;
5. Membawa, menyimpan, atau menggunakan suatu benda atau barang yang patut disadari dan/atau melakukan tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri dan/atau orang lain;
6. Tidak bersedia mempertanggungjawabkan keuangan dan kegiatan kemahasiswaan menurut peraturan yang berlaku di UMS;
7. Melakukan pencemaran nama baik almamater atau melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan civitas akademika;
8. Melakukan perbuatan yang disadari atau setidak – tidaknya diketahui sebagai perbuatan curang atau perbuatan curang lainnya;
9. Melakukan tindakan terlarang menurut syari'at, peraturan perundang – undangan yang berlaku di Indonesia baik di dalam maupun di luar kampus.
10. Menggunakan pakaian disadari atau setidak – tidaknya diketahui melanggar norma – norma kesopanan, kesusilaan, dan ajaran agama Islam;
11. Tinggal di kampus layaknya indekost (tidur, menjemur, memasak, dan sebagainya);
12. Melakukan kegiatan politik praktis baik secara langsung maupun tidak langsung di dalam kampus;
13. Melakukan kegiatan baik secara individu maupun secara berkelompok yang mengganggu jalannya proses belajar mengajar.
14. Memasang media informasi (spanduk, leaflet, poster dll) yang bertentangan dengan syariat Islam, peraturan perundangan – undangan, peraturan universitas dan kode etik mahasiswa ----- PERLU SOP MEMASANG MEDIA INFORMASI
15. Menyebarkan informasi melalui media elektronik maupun non elektronik yang bertentangan dengan syariat Islam, peraturan perundangan – undangan, peraturan universitas dan kode etik mahasiswa

- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana ayat (1) dikenakan sanksi paling berat skorsing selama – lamanya empat (4) semester atau diberhentikan sebagai mahasiswa.

BAB VI PEMALSUAN

Pasal 9

- (1) Dengan sengaja memalsukan surat keterangan dan/atau rekomendasi dari pejabat dosen atau karyawan untuk kepentingan pribadi dan/atau orang lain yang dapat merugikan UMS dikenakan sanksi paling berat skorsing 3 (tiga) semester.
- (2) Dengan sengaja secara langsung atau tidak langsung memalsukan, atau menyalahgunakan surat atau penjiplakan karya ilmiah atau bukti-bukti lain untuk kepentingan pribadi dan atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kampus dikenakan sanksi paling berat skorsing 3 (tiga) semester.

Pasal 10

- (1) Dengan sengaja memalsukan kartu atau tanda bukti ujian untuk kepentingan pribadi dan atau orang lain guna mengikuti ujian dikenakan sanksi paling berat skorsing 2 (dua) semester.
- (2) Dengan sengaja memalsukan tanda tangan pejabat atau dosen atau stempel yang sah berlaku di lingkungan UMS untuk kepentingan pribadi dan atau orang lain dikenakan sanksi paling berat diberhentikan sebagai mahasiswa.
- (3) Dengan sengaja merubah atau mengganti matakuliah yang ditempuh sebagian atau seluruhnya secara tidak sah, dikenakan sanksi pembatalan sebagian atau seluruhnya mata kuliah tersebut dan atau paling berat skorsing 2 (dua) semester.
- (4) Dengan sengaja melakukan atau bekerja sama dengan orang lain untuk merubah atau memalsu sebagian atau seluruh Kartu Hasil Studi (KHS), transkrip nilai akademik, atau bukti catatan nilai lainnya sehingga berbeda dengan aslinya dikenakan sanksi pembatalan seluruh nilai mata kuliah yang bersangkutan dan sanksi paling berat diberhentikan sebagai mahasiswa.

Pasal 11

- (1) Dengan sengaja meminta atau menyuruh orang lain menggantikan kedudukannya sebagai peserta ujian dengan memalsukan seluruh atau sebagian dari bukti-bukti sebagai peserta ujian atau dengan cara lainnya, dikenakan sanksi pembatalan hasil ujian mata kuliah pada semester itu dan atau sanksi paling berat skorsing 4 (empat) semester.
- (2) Dengan sengaja bertindak selaku pengganti (Joki) dalam ujian dari seorang mahasiswa atau calon mahasiswa baik di dalam maupun di luar UMS dikenakan sanksi paling berat skorsing 4 (empat) semester. atau diberhentikan sebagai mahasiswa.
- (3) Setiap mahasiswa meminta atau menyuruh orang lain menggantikan kedudukannya sebagai peserta ujian masuk sebagai calon mahasiswa dengan memalsukan seluruh atau sebagian dari bukti-bukti sebagai peserta ujian atau dengan cara lainnya, dikenakan sanksi paling berat diberhentikan sebagai mahasiswa.

BAB VII PENCURIAN DAN PERUSAKAN

Pasal 12

- (1) Setiap mahasiswa yang terlibat langsung atau tidak langsung mencuri atau merampas harta benda milik UMS atau milik orang lain di dalam atau di luar kampus dikenakan sanksi paling berat diberhentikan sebagai mahasiswa dan mengganti barang yang dicuri atau mengganti dengan uang senilai barang yang dicuri.

- (2) Setiap mahasiswa yang melakukan percobaan pencurian atau perampasan sebagaimana ayat (1) dikenakan sanksi paling berat skorsing 3 (tiga) semester.
- (3) Setiap mahasiswa yang terlibat langsung atau tidak langsung merusak atau menghancurkan harta benda milik UMS atau milik orang lain di dalam atau di luar kampus sehingga benda itu menjadi rusak, atau tidak berfungsi lagi dikenakan sanksi paling berat diberhentikan sebagai mahasiswa dan mengganti barang yang dirusak atau mengganti dengan uang senilai barang yang dirusak.

BAB VIII PEMERASAN DAN PENGANCAMAN

Pasal 13

- (1) Setiap mahasiswa yang langsung atau tidak langsung memeras atau mengancam sesama mahasiswa atau orang lain di dalam atau di luar kampus, dikenakan sanksi paling berat skorsing 2 (dua) semester.
- (2) Setiap mahasiswa yang memeras dan atau mengancam pejabat, dosen dan atau karyawan di dalam atau di luar kampus dikenakan sanksi paling berat skorsing 4 (empat) semester.

BAB IX PENGANIAYAAN DAN PERKELAHIAN

Pasal 14

- (1) Setiap mahasiswa yang menganiaya sesama mahasiswa atau orang lain baik di dalam atau di luar kampus dikenakan sanksi paling berat skorsing 4 (empat) semester.
- (2) Setiap mahasiswa yang menganiaya pejabat, dosen, atau karyawan di dalam atau di luar kampus, dikenakan sanksi paling berat diberhentikan sebagai mahasiswa dan membayar ganti kerugian.

Pasal 15

- (1) Setiap mahasiswa yang terlibat perkelahian di dalam atau di luar kampus, dikenakan sanksi paling berat skorsing 3 (tiga) semester.
- (2) Setiap mahasiswa yang terlibat perkelahian sebagaimana ayat (1), yang berakibat cacat atau mati dikenakan sanksi paling berat diberhentikan sebagai mahasiswa.

BAB X NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, OBAT BERBAHAYA (NARKOBA), DAN MINUMAN KERAS SERTA BENDA-BENDA YANG BERBAHAYA

Pasal 16

Setiap mahasiswa yang memproduksi, menyimpan, membawa, mengedarkan, mengkonsumsi, atau memiliki narkoba, dikenakan sanksi paling berat diberhentikan sebagai mahasiswa.

Pasal 17

Setiap mahasiswa yang memproduksi, menyimpan, membawa, mengedarkan, mengkonsumsi, atau memiliki minuman keras, dikenakan sanksi paling berat skorsing 4 (empat) semester.

Pasal 18

Setiap mahasiswa yang membawa, menyimpan, dan/atau menggunakan suatu benda atau barang yang patut disadari atau tidak disadari bahwa perbuatan tersebut dapat membahayakan diri sendiri dan/atau orang lain, dikenakan sanksi paling berat skorsing 4 (empat) semester .

BAB XI PERBUATAN ASUSILA DAN PERJUDIAN

Pasal 19

- (1) Setiap mahasiswa yang mengucapkan atau menulis kata-kata tidak senonoh di dalam atau di luar kampus yang bertentangan dengan nilai kepatutan dan syariat Islam, dikenakan sanksi paling berat skorsing 2 (dua) semester.
- (2) Setiap mahasiswa yang melakukan perbuatan cabul atau pelecehan seksual di dalam atau di luar kampus yang bertentangan dengan nilai kepatutan dan syariat Islam, dikenakan sanksi paling berat skorsing 3 (tiga) semester.
- (3) Setiap mahasiswa yang melakukan perbuatan zina di dalam atau di luar kampus, dikenakan sanksi paling berat diberhentikan sebagai mahasiswa.
- (4) Setiap mahasiswa yang melakukan pemerkosaan, baik terlibat langsung atau tidak langsung, di dalam atau di luar kampus, dikenakan sanksi paling berat diberhentikan sebagai mahasiswa.
- (5) Setiap mahasiswa yang melakukan perbuatan seksual dengan jenis kelamin yang sama (Lesbian, Gay, Biseksual, Transseksual /LGBT) di dalam atau di luar kampus, dikenakan sanksi paling berat diberhentikan sebagai mahasiswa
- (6) Setiap mahasiswa yang memproduksi, menyimpan, menyebarkan, atau mempertontonkan gambar, tulisan, barang, yang bersifat pornografi dan atau yang merendahkan rasa kesusilaan, dikenakan sanksi paling berat skorsing 2 (dua) semester.
- (7) Setiap mahasiswa yang mengadakan, mengikuti atau berperan serta dalam kegiatan perjudian dalam bentuk apapun, di dalam atau di luar kampus, dikenakan sanksi paling berat skorsing 2 (dua) semester.

BAB XII PENGHINAAN DAN PENCEMARAN NAMA BAIK

Pasal 20

- (1) Setiap mahasiswa yang menghina dan atau mencemarkan nama baik sesama mahasiswa di dalam atau di luar kampus dikenakan sanksi paling berat skorsing 1 (satu) semester.
- (2) Setiap mahasiswa yang menghina dan atau mencemarkan nama baik pejabat, dosen, karyawan dan atau orang lain di dalam atau di luar kampus, dikenakan sanksi paling berat skorsing setinggi-tingginya 2 (dua) semester.
- (3) Tindakan sebagaimana tersebut ayat (1) dan (2) adalah pelanggaran aduan.

BAB XIII MAHASISWA YANG DIJATUHI PIDANA OLEH PENGADILAN

Pasal 21

Mahasiswa yang karena melakukan kejahatan telah dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat dijatuhkan sanksi paling berat diberhentikan sebagai mahasiswa.

BAB XIV ETIKA KEPRIBADIAN

Pasal 22

- (1) Dalam rangka menertibkan cara berpenampilan di kalangan mahasiswa yang sesuai dengan citra, misi dan visi UMS, maka mahasiswa yang mengikuti kegiatan proses belajar mengajar baik di dalam maupun di luar kampus harus mematuhi ketentuan yang sesuai dengan ajaran Islam.

- (2) Untuk mahasiswa laki-laki, mengatur rambutnya dengan rapi, tidak bertato, tidak mengenakan perhiasan (asesoris) sebagaimana dikenakan perempuan, tidak mengenakan sandal, kaos oblong, dan atau pakaian yang kurang pantas dan tidak menutup aurat.
- (3) Untuk mahasiswa perempuan, dalam berpakaian menutup aurat dan cukup longgar, tidak transparan; tidak memakai make up dan perhiasan (asesoris) yang berlebihan, tidak memakai anting-anting atau giwang atau sejenisnya di bagian hidung, bibir, dan atau pada bagian tubuh manapun selain pada bagian telinga, tidak mengenakan sandal, kaos oblong dan atau pakaian kurang pantas.
- (4) Barangsiapa melanggar ketentuan sebagaimana tersebut dalam ayat (1), (2), dan (3) akan dikenakan sanksi paling berat tidak dapat diusulkan sebagai calon mahasiswa berprestasi dan atau penerima beasiswa tertentu.

BAB XV TIM PENCARI FAKTA DAN TIM KHUSUS

Pasal 23

- (1) Pencarian fakta dilakukan oleh Tim Pencari Fakta atas inisiatif Tim Pencari Fakta atau diminta oleh Tim Disiplin Mahasiswa guna untuk kelengkapan pembuatan rekomendasi kepada Rektor atau Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan
- (2) Tim Pencari Fakta menyusun laporan temuan/kegiatan untuk disampaikan kepada Tim Disiplin Mahasiswa atas pelanggaran mahasiswa yang terjadi.
- (3) Tim Pencari Fakta bisa memberikan keterangan diminta atau tidak diminta kepada Tim Disiplin Mahasiswa.

Pasal 24

- (1) Tim khusus adalah tim ahli bidang tertentu yang bertugas untuk :
 - a. Membantu Tim Disiplin Mahasiswa berdasarkan keahliannya;
 - b. Melaksanakan pemeriksaan terhadap terduga sesuai dengan keahlian yang dimiliki atas permohonan Tim Disiplin Mahasiswa.
- (2) Hasil Pemeriksaan disampaikan kepada Tim Disiplin Mahasiswa secara tertulis, guna untuk membuat rekomendasi kepada Rektor atau Wakil Rektor bidang kemahasiswaan.

BAB XV TATA CARA DAN PROSEDUR PENJATUHAN SANKSI

Pasal 25

- (1) Pemeriksaan, pembuktian dan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan tentang adanya pelanggaran dan/atau kejahatan oleh mahasiswa dilakukan oleh Tim Disiplin.
- (2) pemeriksaan, pembuktian dan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan tentang adanya pelanggaran terhadap Pasal 8 ayat (1) angka 10 dan 11, Pasal 10 ayat (1), (3) dan ayat (4), Pasal 22 dilakukan oleh Tim Disiplin Mahasiswa tingkat Fakultas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya Tim Disiplin Mahasiswa tingkat Fakultas berkoordinasi dengan Tim Disiplin Mahasiswa Tingkat Universitas.
- (4) Untuk kepentingan pemeriksaan dan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan, Tim Disiplin berwenang memanggil atau menghadirkan tersangka dan/atau saksi melalui surat sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali.
- (5) Pemanggilan tersangka diperlukan selain untuk memberikan keterangan juga pembelaan
- (6) Apabila setelah dipanggil dengan surat resmi sebanyak maksimal tiga kali dan selambat – lambatnnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal pengiriman surat panggilan terakhir tidak hadir dan tidak mengajukan pembelaan, maka hak pembelaannya gugur dan pemeriksaan dapat dilanjutkan.

- (7) Untuk kepentingan pemeriksaan dan pembuatan rekomendasi Tim Disiplin Mahasiswa dapat meminta bantuan kepada Tim Pencari Fakta dan Tim Khusus.
- (8) Hasil pemeriksaan disusun dalam Berita Acara Pemeriksaan beserta Rekomendasi sanksi diajukan kepada Wakil Rektor III bidang kemahasiswa, kecuali hasil pemeriksaan sebagaimana ayat (2) pasal ini diajukan kepada Dekan.

BAB XVI HAK PEMBELAAN MAHASISWA

Pasal 26

- (1) Mahasiswa yang menjadi tersangka berhak mengajukan pembelaan kepada Tim Disiplin.
- (2) Pembelaan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) di atas diajukan sendiri baik lisan maupun tertulis.
- (3) Sebelum mengajukan pembelaan tersangka dapat berkonsultasi dengan lembaga bantuan hukum atau sejenisnya sebelum masa waktu pembelaan berakhir.
- (4) Mahasiswa yang karena tindakannya berada dalam tahanan Kepolisian, atau Kejaksaan, atau Pengadilan, Tim Disiplin cukup mengecek kebenaran penahanan dan tuduhan atasnya, dan mahasiswa bersangkutan kehilangan hak seperti diatur dalam pasal ini.

BAB XVII PUTUSAN PENJATUHAN SANKSI

Pasal 27

- (1) Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah Wakil Rektor bidang kemahasiswaan dan Dekan kecuali terhadap jenis sanksi sebagaimana Pasal 5 ayat (2) angka 1 dijatuhkan oleh Rektor
- (2) Dekan dapat menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran Pasal 8 ayat (1) angka 10 dan 11, Pasal 10 ayat (1), (3) dan ayat (4), serta Pasal 22 ayat (1), (2), (3) dan (4)
- (2) Dasar penjatuhan sanksi sebagaimana ayat (1) adalah BAP beserta rekomendasi sanksi yang diajukan oleh Tim Disiplin.

Pasal 28

- (1) Sanksi yang telah dijatuhkan Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (1) dituangkan dalam Surat Keputusan Rektor, atau Surat Keputusan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan atau Surat Keputusan Dekan.
- (2) Surat Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya memuat tentang:
 - a. Identitas lengkap mahasiswa, meliputi: nama, tempat tanggal lahir/umur, fakultas atau program studi, nomor induk mahasiswa (NIM), jenis kelamin, dan alamat;
 - b. Pertimbangan atau konsideran secara lengkap mengenai fakta dan alat bukti, pasal-pasal yang dilanggar, isi putusan, hari dan tanggal dibuatnya putusan, nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi.

BAB XVIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

- (1) Sanksi yang dijatuhkan pengadilan terhadap mahasiswa karena aktivitas politiknya tidak dengan sendirinya berakibat dijatuhkan sanksi oleh UMS.

- (2) Mahasiswa yang tidak dapat mempertanggungjawabkan aktivitas lembaga kemahasiswaan atau terlibat langsung atau tidak langsung dengan penyalahgunaan keuangan lembaga Kemahasiswaan, baik yang bersumber dan UMS atau sumber lain, dikenakan sanksi paling berat skorsing 2 (dua) semester.

BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 30

- (1) Putusan penjatuhan sanksi yang telah dijatuhkan sebelum peraturan ini ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Terhadap pelanggaran yang terjadi sebelum peraturan ini ditetapkan, diberlakukan peraturan yang berlaku pada saat pelanggaran dilakukan.
- (3) Segala peraturan yang ada sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan tata tertib ini dinyatakan masih tetap berlaku.
- (4) Peraturan ini sebagai pedoman bagi Tim Disiplin Mahasiswa Tingkat Universitas dan Tim Disiplin Mahasiswa Tingkat Fakultas dalam melakukan pemeriksaan dan penjatuhan sanksi.

Pasal 30

- (1) Surat Keputusan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Surat Keputusan Rektor ini akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan

Surakarta, 9 Juli 2018 M
25 Syawal 1439 H



Rektor,

Dr. H. Sofyan Anif, M.Si.
NIDN: 0625066301